**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROPINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah Propinsi serta memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara.
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
DAN
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2003 SULAWESI UTARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Bidang-Bidang;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Sub Bagian-Sub Bagian dan Seksi-Seksi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- B. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, terdiri dari :
 - a. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Bidang Produksi Tanaman Pangan;
 - c. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura;
 - d. Bidang Produksi Peternakan;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
- C. Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Pengelolaan Air;
 - b. Seksi Pengembangan Pengelolaan Lahan;
 - c. Seksi Perluasan Areal;
 - d. Seksi Sarana Pengelolaan Lahan dan Air.
 - (2) Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Tanaman Sereal;ia;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian;
 - c. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
 - d. Seksi Sarana Produksi Tanaman Pangan.